

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan entitas pelapor yang ditugaskan untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam menyajikan laporan keuangan, pemerintah daerah harus menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan pengambilan keputusan.

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu entitas. Pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitas laporan keuangan antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas juga memiliki komponen-komponen yang harus ada dalam penyusunan laporan keuangan.

Komponen laporan keuangannya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji. Masih banyaknya laporan keuangan pemerintah daerah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan ketentuan dan adanya penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan suatu badan yang diberikan tugas oleh negara untuk mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar mengetahui kualitas dari laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk bertanggungjawab dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang ditugaskan untuk menyusun laporan keuangan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Nugraeni dan Budiantara, (2015) dan Oktarina, dkk (2016) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan khususnya yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum sepenuhnya memiliki karakteristik kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Publik (SAP), sehingga pemahaman terhadap SAP yang diterapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan. SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum guna meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya

mendapatkan penilaian berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan oleh BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini. Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pemerintah daerah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk dapat di implementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. Untuk dapat menggunakan aplikasi SIMDA, diperlukan seseorang *user* yang berkualitas. Nasaruddin (2008) yang dikemukakan oleh Ihsanti (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan dari suatu instansi karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan. Dengan dimilikinya sumber daya yang berkualitas tentunya meningkatkan kualitas informasi pada kualitas pelaporan.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Pati, dari 32 pemerintah daerah di Jawa Tengah, penerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Jawa Tengah yaitu Pemrov Jateng, Pemkot Pekalongan, Pemkot Surakarta, Pemkot Semarang, Pemkot Salatiga, Pemkot Magelang, Kab Semarang, Cilacap, Banjarnegara, Grobogan, Sragen, Karanganyar, Tegal, Blora, Pemasang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Pati, Jepara, Magelang, Batang, Kebumen, Demak, Kudus, Kendal, Sukoharjo, Purbalingga, Boyolali, Wonogiri, Pekalongan, dan Banyumas. Penghargaan tersebut diberikan kepada 32 pemerintah daerah berdasar pada akuntabilitas pengelolaan dan laporan keuangan daerah. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Ganjar didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan daerah (Kakanwil DJPD) Jawa Tengah.

Sementara itu, Ganjar berharap penghargaan ini mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan target. Jadi, jika selama ini pemerintah hanya berorientasi menciptakan *good government* harus diubah menjadi *clean government* karena inilah yang diharapkan masyarakat saat ini. Penghargaan ini sekaligus untuk memperkuat sinergitas antar pemerintah daerah dalam menciptakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. “Karena bisa menilai langsung uang masyarakat ini untuk apa saja. Akan terbangun komitmen dan semangat bersama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan daerah (Kakanwil DJPD) Jawa Tengah.

Kepada para kepala daerah, Ganjar mengatakan agar terus berupaya meningkatkan integritas dan selalu mewaspadaai celah korupsi pada era digital ini. “kita harus melakukan pertaubatan nasional yang bisa diaplikasikan dengan sistem. *E-katalog* itu membantu, tapi sudah ada yang menemukan cara terbaik korupsi dari e-katalog, yaitu lewat komunikasi bawah tangan. Maka jaga diri, spiritualitas, ingat keluarga.” Kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar (KOMPAS.com, 2019).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dikatakan berkualitas apabila ada faktor – faktor yang mempengaruhinya, faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, sistem yang terintegritas secara menyeluruh dan mampu menghasilkan informasi yang handal dan relevan sehingga mampu memberikan *output* laporan keuangan yang berkualitas yang diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi manajemen daerah sangat diperlukan guna untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah secara efektif dan efisien (Azzindani dkk, 2019) hasil pengujian berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan juga sebaliknya apabila laporan keuangan yang dihasilkan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen daerah tidak efektif dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku maka sistem informasi manajemen tidak dapat berjalan secara efektif (Erviana, 2017) hasil pengujian berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain implementasi sistem informasi manajemen, faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kinerja aparatur pemerintah daerah, yang professional dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Aparatur pemerintah yang memiliki kinerja yang baik dibidang keuangan dapat menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Azzindani dkk, 2019) hasil pengujian berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan juga sebaliknya kurangnya pemahaman dalam hal pembuatan laporan keuangan yang membuat laporan keuangan belum sesuai yang diinginkan, aparatur pemerintah yang baik harus mampu memahami dan memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan sangat dibutuhkan agar mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan juga para aparatur harus mempunyai keinginan untuk meningkatkan wawasan yang dimilikinya (Sholohah dan Sulistyawati, 2019) hasil pengujian berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain kinerja aparatur pemerintah daerah, faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan standar akuntansi pemerintah daerah, suatu konsep atau aturan akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintah diharapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan standar akuntansi. Hal ini menunjukan semakin baik standar akuntansi yang diterapkan maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan (Armel, 2017) hasil

pengujian berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitupun sebaliknya semakin rendah standar akuntansi yang diterapkan maka akan semakin rendah pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Nilam Sari, 2015).

Selain penerapan standar akuntansi pemerintah, faktor keempat yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah *good governance*, upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dengan adanya *good governance* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik berkaitan dengan pendanaan untuk masyarakat, kemudian pendanaan tersebut dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kedalam laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *good governance* semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan pemerintah (Anggreni dan Widanaputra dkk, 2018). Begitupun sebaliknya semakin rendah penerapan *good governance* semakin rendah pula kualitas laporan keuangan (Silvia dan Ardiani, 2018)

Faktor kelima yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kompetensi sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki seseorang berupa keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu tugas sehingga kemampuan tersebut dapat digunakan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi kemampuan seseorang semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Rusvianto Dimas dan Mulyani Sri dkk, 2018). Begitupun

sebaliknya semakin rendah kemampuan yang dimiliki seseorang semakin rendah pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Evicahyani dan Setiawina, 2016).

Penelitian ini dari penelitian Azzindani dkk (2019) yang meneliti tentang Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penambahan variabel *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia. Alasan penambahan variabel ini karena untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan *good governance* dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, sehingga paham terhadap standar dan aturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk kompetensi sumber daya manusia alasannya karena dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, organisasi perangkat daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan pendidikan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan yang sangat diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada.

Perbedaan kedua terletak pada tempat penelitian yaitu penelitian yang dilakukan Azzindani Rahmatia dan Pituringsih Endar dkk (2019) dilakukan di Lombok Tengah sedangkan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu di Kota Pati. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah,**

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Pati)”.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden yang akan dijadikan sampel adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati.
2. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
3. Variabel Independen yang digunakan adalah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Apakah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- 2 Apakah Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

- 3 Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- 4 Apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- 5 Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh penerapan standart akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Bagi Kabupaten Pati

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan gambaran terhadap aspek – aspek yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terutama di Kabupaten Pati.

1.5.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman mengenai akuntansi sektor publik khususnya tentang implementasi sistem informasi manajemen daerah, kinerja aparatur pemerintah daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah, good governance dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5.3 Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak pemerintah daerah dalam mengevaluasi bagaimana pelaporan keuangan pemerintah daerah saat ini dan hasil penelitian ini merupakan masukan untuk dijadikan bahan strategi dalam rangka menciptakan dan mempertahankan kualitas keuangan pemerintah daerah yang sehat.